Penataan Wilayah pada Masa Kerajaan Sunda

Agus Aris Munandar

Keywords: history, archaeology, Hindu-Buddhist, Kingdom of Sunda, West Java

Berkala Arkeologi
https://berkalaarkeologi.kemdikbud.go.id/

Volume 14 No. 2, 1994, 95-105
DOI: 10.30883/jba.v14i2.706

PENATAAN WILAYAH PADA MASA KERAJAAN SUNDA

Agus Aris Munandar
(Jurusan Arkeologi FSUI)

1.

Kerajaan Sunda adalah salah satu kerajaan dalam masa Hindu-Buddha yang terletak di Jawa Barat. Tidak seperti sejarah kerajaan-kerajaan lainnya yang pernah tumbuh dan berkembang di Pulau Jawa (Mataram, Kadiri, Singhasari, Majapahit), sejarah Kerajaan Sunda masih belum banyak diungkapkan oleh para ahli. Hal ini disebabkan karena sumber sejarah yang berkenaan dengan perkembangan kerajaan tersebut sangat terbatas, peninggalan-peninggalannya pun tidak terlalu banyak, kalaupun ada jejak sejarah itu sudah sangat rusak. Walaupun demikian para ahli sejarah dan arkeologi tentunya masih berharap bahwa di kemudian hari akan ditemukan lagi sumber sejarah baru yang dapat membantu mengungkapkan sejarah Kerajaan Sunda yang masih belum dapat terurai jelas.

Kerajaan Sunda yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah kerajaan yang berkembang dalam abad 14--15 M, dan yang beribukotakan di Pakuan / Pakwan Pajajaran (Sumadio 1984: 368--83). Semula para ahli menyebut kerajaan itu dengan nama Kerajaan Pajajaran atau Pakwan Pajajaran. Namun kemudian Ayatrohaedi berhasil mengungkapkan lewat berbagai berita sejarah bahwa kerajaan yang dimaksudkan itu seharusnya disebut dengan Kerajaan Sunda, bukan Pajajaran. Nama Pakwan Pajajaran sebenarnya menunjuk pada ibu kota kerajaan itu tempat raja bersemayam di kedatonnya (Ayatrohaedi 1978: 47--52).

Menurut Robert von Heine Geldern kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Asia Tenggara mempunyai konsep kosmologis bahwa pusat kekuatan magis terletak di istana raja yang berkedudukan di ibu kota kerajaan (1982: 6–8). Karena kerajaan-kerajaan tersebut merupakan gambaran kecil (mikrokosmos) dari susunan jagat raya (makrokosmos) yang konsentris dan berpusatkan pada Gunung Meru. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi (Siwa / Wisnu), dia bersemayam di istananya yang dianggap lambang Gunung Meru. Begitupun wilayah kerajaan ditata sesuai dengan gambaran kosmomagis yang dikenal baik dalam agama Hindu ataupun Buddha. Ibu kota adalah pusat kerajaan yang dikelilingi oleh wilayah-wilayah kerajaan lainnya (propinsi), daerah taklukan, dan juga negara-negara mitra (sahabat). Gambaran seperti itu mungkin dapat terlihat dalam periode Singhasari dan Majapahit yang jelas disebutkan dalam prasasti dan kitab **Nagarakrtagama** bahwa kedua kerajaan tersebut mempunyai berbagai negara daerah. Namun bagaimana halnya dengan Kerajaan Sunda apakah juga memiliki negara-negara daerah masih belum diketahui secara pasti. Hal lain yang patut diperhatikan penataan wilayah yang pastinya telah dikenal dalam masa itu, penataan wilayah Kerajaan Sunda hingga saat ini masih belum juga diperhatikan oleh para ahli; untuk itu kajian ini berusaha mengungkapkan penataan wilayah kerajaan tersebut sejauh data yang tersedia hingga kini.

2.

Berdasarkan berbagai sumber tertulis dapat diketahui bahwa Kerajaan Sunda mempunyai beberapa daerah yang mengakui raja Sunda sebagai seorang yang dipertuan. Sangat mungkin daerah tersebut mempunyai penguasa sendiri yang berhak menjalankan pemerintahan daerahnya, tetapi tetap mengakui raja Sunda yang berkedudukan di ibu kota sebagai penguasa tunggal seluruh wilayah kerajaan.

Dalam bagian akhir **Carita Parahyangan** yang menguraikan perihal Kerajaan Sunda ketika ibu kotanya telah berkedudukan di Pakwan Pajajaran, disebutkan beberapa wilayah kerajaan antara lain yaitu, Medang Hujung Cariang, Winduraja, Galuh, Gegeromas, Jampang, Tanjung, Sumedang, Tasik, Majaya Rajagaluh, dan Kalapa (CP 54--8). Sementara itu menurut laporan Tome Pires, seorang Portugis yang pernah berkunjung ke wilayah Kerajaan Sunda dalam awal abad ke-16 menyebutkan adanya beberapa bandar penting kerajaan tersebut, yaitu: Banten, Pontang, Cigede, Tangara, Kalapa, dan Cimanuk (Cortesao 1944: 168--73).

Dalam prasasti Mula Malurung 1255 M yang dikeluarkan akhir pemerintahan raja Wisnuwarddhana di Singhasari disebutkan beberapa negara daerah beserta raja-rajanya yang merupakan bawahan Singhasari, yaitu Madhura, Lamajang, Daha, Glang-glang, Morono, Hring, dan Lwa (Boechari, 1980:57). Sementara negara-negara "bawahan" Majapahit atau negara-negara yang mengakui wibawa Majapahit disebutkan dalam **Nagarakrtagama** pupuh XIII-XIV.

Bandar-bandar tersebut diuraikan oleh Tome Pires sebagai berikut, **Banten** merupakan kota dagang yang baik, terletak di tepi sungai dan dipimpin oleh seorang kapten (sahbandar ?). Perniagaannya

Menurut J Hageman (1867) kerajaan Sunda mempunyai beberapa daerah bawahan sebagai berikut: Cirebon Larang, Cirebon Girang, Sindang Barang, Sukapura, Kidang Lamotan, Galuh, Astuna Larang, Tajek Nasing, Sumedang Larang, Ujang Mubara, Ajong Kidul, Kamuning Gading, Pancakaki, Tanjung Singguru, Kalapa, Banten Girang, Pula Sari, dan Ujung Kulon (Sutaarga 1965: 53). Daerah-daerah tersebut merupakan negara bawahan, karena setiap daerah mempunyai rajanya sendiri; namun mereka semua tunduk pada raja Sunda.

H.ten Dam (1957) menyatakan bahwa wilayah Kerajaan Sunda di pedalaman dihubungkan oleh jaringan jalan yang dimulai dari ibu kota hingga daerah terluar kekuasaan Sunda yang masih mungkin dicapai jalur jalan. Jalan yang menuju ke timur menghubungkan ibu kota Pakwan Pajajaran dengan Karangsambung, daerah itu terletak di tepi sungai Cimanuk, batas kerajaan Sunda paling timur. Jalan yang menuju ke timur melalui Cileungsi dan Cibarusa, dari tempat itu membelok ke utara sampai di Karawang, di tepian Citarum (Desa Tanjungpura). Dari Desa Tanjungpura jalan itu berlanjut melalui Cikao dan Purwakarta hingga berakhir di Karangsambung. Kemungkinan dari Karangsambung jalan itu masih berlanjut ke arah timur dan selatan. Ke arah timur sampai ke Cirebon, lalu berbelok ke selatan menuju Galuh atau Kawali dengan melewati Kuningan. Jalan yang ke arah selatan mungkin melalui Sindangkasih dan Talaga dan akhirnya menuju juga Kawali atau Galuh (Dam 1957: 299; Sutaarga 1965: 52; Ayatrohaedi 1980/1981: 37)

meliputi Sumatra dan kepulauan Maladewa. Banten merupakan bandar untuk beras, lada, dan bahan makanan lainnya.

Pontang merupakan kota besar juga, namun pelabuhannya tidak sepenting Banten, barang-barang yang diperdagangkan sama dengan Banten.

Cigede adalah kota besar, perniagaannya terjadi dengan Priaman, Andalas, Tulang-bawang, Sekampung dan lain-lain. Barang yang diperdagangkan sama dengan Banten dan Pontang.

Tangara adalah kota pelabuhan besar, barang yang diperdagangkan sama dengan pelabuhan terdahulu.

Kalapa merupakan bandar yang sangat besar, merupakan pelabuhan Sunda yang terpenting, terbesar, dan terbaik. Jalur niaganya lebih luas antara lain dengan Sumatra, Palembang, Lawe, Tanjungpura, Makasar, Jawa, dan Madura. Terdapat sistem pemerintahan yang teratur, raja mengeluarkan peraturan tertentu setiap pelanggaran yang dilakukan penduduk.

Cimanuk merupakan bandar Sunda paling Timur, juga tanda batas kerajaan. Di Bandar itu sudah banyak berdiam orang-orang beragama Islam, walau sahbandar beragama Sunda (Cortesao 1944: 169-73; Ayatrohaedi 1980/81: 35--6)

Jalur jalan lainnya adalah yang menghubungkan ibu kota Pakwan dengan daerah-daerah sebelah baratnya. Jalan itu bermula dari Pakwan melalui Jasinga dan Rangkas Bitung menuju Serang, dan berakhir di Banten yang merupakan bandar Kerajaan Sunda yang paling barat. Jalan lainnya menghubungkan Pakwan dengan Ciampea dan Rumpin. Jalur itu terhenti di Rumpin, karena perjalanan selanjutnya diteruskan dengan perahu melalui Sungai Cisadane (Dam 1957: 297; Ayatrohaedi 1980/81: 37)

Jalur-jalur jalan tersebut sangat penting bagi perekonomian Sunda, tentunya hasil bumi Kerajaan Sunda dan keperluan penduduk didaerah pedalaman diangkut lewat jalan-jalan tersebut (Ayatrohaedi 1980/81: 37). Data tentang jalan tersebut mempunyai makna lain lagi, seperti telah disebutkan bahwa jalan-jalan itu melewati beberapa daerah tertentu, dan sepanjang jalur itu tentunya melewati desa-desa pedalaman yang cukup banyak jumlahnya. Jadi dapat diketahui bahwa di samping kota-kota (yang di pedalaman ataupun bandar) yang mempunyai penguasa daerah sendiri, terdapat juga desa-desa yang berada dalam wilayah administrasi suatu "negara daerah" tertentu.

Bujangga Manik --seorang pendeta Hindu dari Sunda-- yang melakukan perjalanan keliling Pulau Jawa (awal abad 16 M), juga membetakan adanya banyak desa di wilayah Kerajaan Sunda. Desa-desa itu sering disebut dengan **lurah** (pada masa kemudian **lurah** berarti kepala desa). Seperti misalnya ketika Bujangga Manik melakukan perjalanan ke timur, ke batas akhir wilayah Sunda; ia melewati beberapa daerah antara lain adalah, Citeureup, Tandangan, Cipunagara (Pamanukan), Lurah Medang Kahiangan, Pada Beunghar, Coman, Timbang, Hujung Barang, Kuningan, Darma, dan Luhur Agung. Setelah ia menyeberangi sungai Cipamali dekat Brebes, ia menyatakan bahwa daerah itu merupakan batas akhir Kerajaan Sunda **(tungtung Sunda)** (Noorduyn 1982:20-1).

Berdasarkan data sejarah tersebut dapat diduga bahwa Kerajaan Sunda telah mempunyai penataan wilayah yang teratur. Bahwa di dalam kesatuan kerajaan tersebut terdapat wilayah ibu kota, kota-kota daerah, bandar, dan baik yang terletak di desa-desa di pedalaman ataupun desa-desa pantai. Keteraturan penataan wilayah Kerajaan Sunda masih mungkin untuk direkonstruksi; gambaran penataan wilayah tersebut sangat mungkin adalah bahwa di pusat kerajaan terdapat ibu kota; di ibu kota terdapat keraton tempat bersemayamnya raja, para pejabat tinggi kerajaan, serta penduduk biasa. Dengan demikian terbentuklah suatu pemukiman yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Setelah wilayah ibu kota terdapat kota-

kota lain yang merupakan "ibu kota" bagi wilayah tertentu, di tempat tersebut terdapat seorang "raja daerah" dengan sebutan berbeda-beda (Tohaan, Prabu, Panji, Mas)[3]. Negara daerah tersebut terbagi lagi dalam desa-desa (lurah) yang merupakan kesatuan wilayah terkecil dalam kerajaan.

Para pejabat yang dikenal dalam pemerintahan kerajaan Sunda ten tunya cukup banyak, namun menurut kitab **Siksa Kanda Ng Karesian** (1440 S/1518 M) terdapat deretan nama pejabat yang tersusun secara tata jenjang, dimulai dari pejabat yang rendah hingga raja. Kitab itu menyebutkan sebagai berikut:

"...wang tani bakti di wado, wado bakti di mantri, mantri bakti di nu nangganan, nu nangganan bakti di mangkubumi, mangkubumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti di hyang..." (Siksa. II: 17--9).

("...petani berbakti (tunduk) kepada Wado, Wado berbakti kepada Mantri, Mantri berbakti kepada Nu Nangganan, Nu Nangganan berbakti kepada Mangkubumi, Mangkubumi berbakti kepada Raja, Raja berbakti kepada Dewata, dewata berbakti kepada Hyang...")

Sebenarnya tata jenjang tersebut disebut dengan **Dasa-Prebakti**, (sepuluh macam kebaktian). Tercakup ke dalamnya adalah anak harus tunduk kepada bapaknya, istri tunduk kepada suaminya, hamba tunduk pada majikan, dan siswa tunduk pada guru. Dalam deretan kebaktian tersebut terdapat nama-nama pejabat negara hingga raja yang mungkin dapat dijadikan data untuk melengkapi kajian ini. Sementara hal baktinya raja kepada dewata dan dewata tunduk pada hyang lebih merupakan tunduk dalam konsep keagamaan.

Dalam kitab yang sama diuraikan tugas-tugas raja dan beberapa pejabat tertentu saja, misalnya **Mangkubumi** dan nakhoda/sahbandar. Tugas-tugas raja diuraikan dengan singkat saja dalam **Siksa Kanda Ng Karesian**, namun sudah mencakup seluruh kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang raja. *"Maka nguni kasorgaan di sakala kaprabuan, kamulyaan kau tamaan, kapremanaan, kawisesaan, ratu tanya"* (Siksa. XIX: 7--8). ("Demikian pula tentang kesempurnaan di seluruh kerajaan, kemuliaan, keutamaan, kewaspadaan, dan keagungan, tanyalah raja").

Jelaslah tugas bahwa raja harus mengusahakan kesempurnaan, dan kemuliaan bagi kerajaannya. Sementara bagi dirinya sendiri ia harus dapat menjadi utama, harus waspada, dan harus dapat mempertahankan keagungannya.

Tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang **mangkubumi** adalah sebagai berikut: *"Hayang nyaho dipatitis bumi ma, ngampihkeun bumi, masinikeun na urang sajagat, parin pasini, ngadengdeng, maraspade, ngukur, nyaruaken, nyipat, midana, lamun luhur dipidatar, an col dipakpak: sing sawatek ampih-ampih ma mangkubumi tanya"* (Siksa. XIX. 10--2). ("Bila ingin tahu tentang cara-cara mengukur tanah, seperti: mengatur tempat, membagi-bagikan kepada seluruh rakyat, memberi tanda batas, meratakan, membersihkan lahan, mengukur, menyamakan, meluruskan, mengatur, bila tinggi didatarkan, bila rendah diratakan, segala macam pengaturan tempat, tanyalah mangkubumi").

Tugas-tugas **mangkubumi** itu secara rinci diuraikan dan semuanya berkenaan dengan masalah lahan, sebab tentunya seorang **mangkubumi** harus mengerti perihal penggunaan lahan dalam kerajaan. Agaknya tokoh **mangkubumi** juga harus menghindari penggunaan jenis lahan yang menurut **Siksa Kanda Ng Karesian** disebut "tanah yang kotor":

"Yang disebut tanah-tanah yang kotor ialah: sodong, saronge, cadas gantung, mungkal pategang, lebak, rancak, kebakan badak, catang nunggang, catang nonggeng, garunggungan, garenggengan, lamah sahar, dangdang warian, hunyur, lemah laki, pitunahan celeng, kalomberan, jaryan, kuburan, golongan tanah terbuang" (Siksa. XXII: 14--8).

Tanah-tanah jenis itulah yang seharusnya dihindari untuk tidak dipergunakan sebagai lahan kegiatan manusia. "Tanah yang kotor" itu tidak mungkin digarap untuk aktivitas pertanian, perumahan, bangunan suci, atau istana raja; sebab bersifat panas dan akan membawa petaka bagi siapa yang menggunakannya.

Jabatan lain yang tugasnya diuraikan karena berkenaan dengan pengetahuan dalam aktivitas di laut adalah nakhoda/sahbandar. **Siksa Kanda Ng Karesian** perlu mencantumkan hal itu mengingat Kerajaan Sunda mempunyai beberapa bandar penting yang melakukan perdagangan ekspor-impor. Menurut kitab tersebut: *"Lamun hayang nyaho di sakweh ning labuhan ma, maka nguni, gosong, gorong, kabua, ryak mokprok,*

---

[3] Dalam berbagai sumber sejarah Kerajaan Sunda terdapat penyebutan yang berbeda-beda untuk menunjuk seorang penguasa. Ada yang disebut dengan **rakean, haji, ratu, ratu haji, tohaan, prebu,** dan lain-lain. Namun istilah yang banyak dipakai dalam naskah Sunda Kuna untuk menyebut seorang penguasa adalah **tohaan** yang artinya "yang dipertuan" sebenarnya hanya istilah lain saja dari raja. Misalnya Tohaan di Sunda (Tarusbawa), Tohaan Sarendet, Tohaan Ratusanghyang, dan Tohaan di Majaya.

Mengenai gelar penguasa-penguasa daerah dari Kerajaan Sunda lihat Amir Sutaarga, **Prabu Siliwangi**. Bandung: Duta Rakyat. Halaman 53.

ryak maling, alun agung, tanjung, hujung, nusa, pulo, karang nunggung, tunggara, barat daya, sing sawatek saba di laut ma, lalayaran, puhawang tanya" (Siksa XIX:13-6)

("Bila ingin tahu semua pelabuhan, demikian pula: gosong, gorong, kabua, riak moprok, riak maling, alun agung, tanjung, hujung, nusa, pulau, karang nunggung, tenggara, barat daya, segala macam tempat di laut, pelayaran, tanyalah nakhoda/sahbandar").

Suatu daerah tersendiri yang juga dikenal dalam Kerajaan Sunda adalah pemukiman khusus kaum agamawan. Berdasarkan uraian prasasti dan naskah-naskah keagamaan Sunda Kuna dapat diketahui bahwa istilah **dewa sasana** mengacu pada pengertian umum tentang suatu tempat suci di Kerajaan Sunda. **Dewa Sasana** mungkin dapat diartikan sebagai "tem-pat persemayaman dewa" (Munandar 1991: 14).

Dewa Sasana terbagi dalam dua jenis, yaitu **Kabuyutan** dan **Kawikuan**. **Kabuyutan** adalah suatu tempat suci yang dijaga dan diurus oleh beberapa orang pendeta saja, sedangkan **Kawikuan** merupakan tempat para wiku (berasal dari kata **Bhiksu —> bhiku —> wiku** = sebenarnya berarti kaum agamawan pria dari agama Buddha). **Kawikuan** sangat mungkin adalah permukiman kaum agamawan, mereka tinggal bersama-sama di tempat sepi, di lereng-lereng gunung atau di tengah hutan, permukiman itu berbentuk suatu pedukuhan (Munandar 1991: 14--5). Contohnya dalam prasasti Kebantenan yang dikeluarkan oleh Sri Baduga Maharaja (abad 15 M) disebutkan tanah **Dewa Sasana** adalah desa/lurah Sunda Sembawa yang dilindungi oleh raja, di tempat tentunya bermukim banyak para wiku hingga terbentuklah suatu lurah; juga disebutkan bahwa di dalam lingkungan pe mukiman itu terdapat suatu **kabuyutan** (Boechari, 1985/86:105--6; Munandar, 1992:280). Jadi dalam suatu lingkungan **kawikuan** mungkin saja terdapat **kabuyutan**, selain itu ada juga **kabuyutan** yang berdiri sendiri sebagai tempat yang dikeramatkan, misalnya **kabuyutan Galunggung** yang disebutkan dalam naskah **Amanat Galunggung** (Danasasmita dkk. 1987: 125) dan **Kabuyutan Pakuan** seperti yang disebut dalam naskah Bujangga Manik (Noorduyn 1982: 419). Pada masa itu **kabuyutan** tentunya cukup banyak, tapi hanya disebutkan beberapa saja dalam karya sastra Sunda Kuna. Bentuk **kabuyutan** sebagai suatu tempat suci untuk pemujaan dewa atau leluhur belum dapat diketahui secara pasti, hanya saja berdasarkan tinggalan arkeologis yang masih dapat diamati diduga dalam suatu **kabuyutan** terdapat suatu bangunan tertentu. Bangunan itu dapat berupa, (1) batur tunggal, dan (2) punden berundak, di kedua bangunan tersebut pada bagian atasnya (teras teratas) terdapat obyek sakral yang menjadi sasaran pemujaan seperti, lingga-yoni, arca-arca, atau benda-benda lainnya (Munandar 1992: 288).

Dalam sumber-sumber tertulis Sunda Kuna dikenal juga adanya **Mandala** sebagai tempat bermukim kaum agamawan[4]. Misalnya dalam naskah **Kawih Paningkes** disebutkan: *" ri dina bukit palasari mandala si pasekulan..."* ("di atas bukit palasari [terdapat] **mandala** Pasekulan"). Naskah **Kawih Paningkes** sendiri digubah di atas bukit Gunung Cupu (salah satu bukit di Gunung Galunggung), pada suatu **mandala** yang disebut Pangarbuhan (Kawih 39.a--39b). Sementara dalam naskah Bujangga Manik disebutkan juga bahwa ia pernah mengunjungi **mandala** Puntang yang terletak di daerah selatan Jawa Barat (Noorduyn 1982: 437).

Mandala adalah suatu pedukuhan tempat bermukimnya kaum agamawan yang menarik diri dari dunia ramai, jadi keberadaannya dalam lingkungan alam sebenarnya identik dengan **kawikuan**. Mungkin saja perbedaan nama itu berkenaan dengan latar belakang agama yang

---

[4] Ada kemungkinan wilayah pemukiman orang Baduy di Kabupaten Lebak dahulu merupakan tempat khusus bagi kaum agamawan yang keberadaannya telah ada sejak jaman Kerajaan Sunda. Sebab mereka sendiri menamakan daerah permukimannya itu dengan **mandala**. Menurut penelitian terhadap mereka disimpulkan bahwa orang-orang Baduy sudah lama menempati wilayahnya itu, jauh sebelum Keruntuhan kerajaan Sunda dalam abad ke 15 M. Kehidupan warga Baduy yang masih mempertahankan banyak tabu, serta kehidupan kesehariannya yang disebut **tapa di mandala** ternyata sesuai dengan ajaran **Amanat Galunggung**, naskah keagamaan yang berasal dari **kabuyutan** Ciburuy, Garut (Danasasmita & Anis Djatisunda 1986:4-6). Jadi tak disangsikan lagi bahwa masyarakat Baduy sekarang adalah kelanjutan dari kaum agamawan yang bermukim di suatu lingkungan **mandala** dalam masa Kerajaan Sunda dahulu. Di daerah tersebut terdapat pula **kabuyutan** yang sangat disucikan dinamakan **Pada Ageung** atau **Sasaka Pusaka Buana**.

Sementara itu di wilayah Baduy juga terdapat daerah larangan yang dinamakan **Sasaka Domas**, mereka percaya di tempat itu berkumpul para **karuhun** (luluhur) yang dapat menjelma dalam bentuk **Guriang** dan **Sanghyang**. Bentuk emanasi itulah yang melindungi warga Baduy dan segala macam marabahaya (Gama 1993:140). Hal ini kembali mengingatkan pada kepercayaan dalam kitab-kitab Sunda Kuna bahwa di samping dewa-dewa dan pantheon Hindu-Buddha, masyarakat waktu itu juga menghormati arwah leluhur. Sekali lagi terlihat adanya kaitan religi Orang Baduy dengan kepercayaan masyarakat Sunda Kuna.

dianut oleh kaum agamawan yang menghuninya. **Kawikuan** dihuni oleh para pendeta Buddha, atau kaum agamawan yang cenderung mempelajari agama Buddha, sedangkan **mandala** dihuni oleh kaum agamawan Hindu. Tapi hal ini perlu penelitian lebih lanjut secara mendalam, mengingat pada masa Sunda Kuna agama Hindu dan Buddha telah terpadu dengan kepercayaan pemujaan pada **Hyang**, sebagaimana yang tersirat dalam naskah-naskah Sunda Kuna pernah diteliti para ahli hingga kini.

Megenai siapa yang bermukim di wilayah khusus kaum agamawan itu prasasti Kebantenan menyatakan di **kawikuan** yang tinggal adalah para wiku, sedangkan yang tinggal dan mengurus di **kabuyutan** dan **mandala** menurut **Amanat Galunggung** ialah para **rama** dan **resi** (Danasasmita Dkk.1987: 125). Sebagai pemimpin di lingkungan **kawikuan, mandala** dan **kabuyutan** ialah **mahapandita** sebagaimana yang disebutkan dalam naskah **Siksa Kanda Ng Karesian** (Siksa IV:4,8; XXVI:2).

Dalam wilayah Kerajaan Sunda, selain terdapat pembagian dan penataan wilayah secara politis, terdapat juga wilayah-wilayah keagamaan yang diakui oleh raja. Penetapan suatu daerah menjadi wilayah keagamaan di Sunda Kuna mungkin dapat disamakan dengan penetapan **sima** dalam kerajaan-kerajaan masa Jawa Kuna. Hanya saja data prasasti dari masa Sunda Kuna sangat sedikit, kalau tidak dikatakan langka. Prasasti yang memerikan penetapan "daerah perdikan" bagi kaum keagamaan dari masa Sunda Kuna hanyalah prasasti Kebantenan, sehingga sukar untuk mengadakan tinjauan lebih lanjut. Namun hal yang penting adalah bahwa di antara sejumlah wilayah keagamaan itu, terdapat satu **kabuyutan** yang dianggap penting, sehingga harus dipertahankan oleh siapapun yang memerintah, yaitu **Kabuyutan Galunggung** sebagaimana yang disebutkan dalam naskah **Amanat Galunggung** (Danasasmita dkk. 1987: 125--6).

3.

Adapun mengenai lokasi ibu kota Kerajaan Sunda yang disebut **Dayo**, menurut Tome Pires, terletak sekitar dua hari perjalanan dari bandar Kalapa ke arah pedalaman. **Dayo** merupakan kota besar, penduduknya sekitar 50.000 jiwa. Rumah-rumah penduduk sangat baik, terbuat dari kayu dengan atap terbuat dari dun jenis palma. Raja bersemayam di istana yang mempunyai 330 tiang kayu, masing-masing tiang sebesar peti anggur ukurannya; tingginya 5 **fathom** (1 **fathom** = 1,828 m). Bagian atas tiang diberi bentuk (ukiran) yang indah[5] (Cortesao 1944: 168; Sumadio 1984: 380--81).

Sisa-sisa ibu kota Pakwan Pajajaran tersebut masih sempat disaksikan oleh orang-orang Belanda ketika mereka mengadakan perjalanan ekspedisi dalam akhir abad 17 hingga awal abad 18. Orang-orang Belanda tersebut mengadakan perjalanan dari Batavia ke selatan. Di wilayah Bogor sekarang mereka menjumpai peninggalan kuna yang oleh penduduk setempat disebut sisa keraton Pakwan. Berita tentang adanya reruntuhan kraton Pakuan pertama kali dilaporkan oleh Scipio, ia dan rombongannya mengadakan eks-pedisi ke pedalaman Jawa Barat pada tahun 1687. Ekspedisi itu kemudian dilakukan lagi oleh Kapitan Adolf Winkler pada tahun 1690, Winkler melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang pernah dikunjungi oleh Scipio dahulu. Kemudian pada tahun 1703, 1704, dan 1709, Abraham van Riebeeck melakukan juga perjalanan ke wilayah yang sama dan melaporkan adanya sisa-sisa keraton Pakuan di wilayah Bogor (Da nasasmita 1979: 5--15, 20--6).

Orang-orang Belanda itu melaporkan hal yang sama dalam ekspedisi-ekspedisinya bahwa di wilayah Bogor sekarang, terdapat berbagai bentuk peninggalan masa lalu yang merupakan sisa kota Pakwan. Di tempat tersebut terdapat sisa parit pertahanan yang dalam, bermacam parit-parit dan saluran, dinding benteng, jalanan berbatu yang mendaki dan yang lurus, tanah lapang (alun-alun), batu bertulis, arca-arca, hutan tua dan lain-lain. Daerah tempat ditemukannya berbagai peninggalan kota Pakwan tersebut diapit oleh sungai yang mengalir sejajar yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane. Di tempat itulah dahulu terdapat kota dan istana raja Pakwan Pajajaran (Danasasmita 1979, 1983: 1--27).

Dalam **Carita Parahyangan** disebutkan bahwa keraton Pakwan Pajajaran dinamakan dengan **pakwan sanghyang sri ratu dewata**, artinya tempat bersemayamnya Sanghyang Sri Ratu Dewata yang disebut-sebut dalam prasasti Batu Tulis Bogor dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakwan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dalam kitab yang sama disebutkan bahwa keraton itu terdiri atas 5 bangunan

[5] Berita Portugis tersebut didukung oleh uraian **Sang Hyang Siksa Kanda Ng Karesian** bahwa kepandaian ukir kayu sudah dikenal masyarakat Sunda Kuna, sehingga tiang-tiang istana raja di Pakwan Pajajaran sudah sepantasnya dilengkapi dengan hiasan. Dalam **Siksa Kanda Ng Karesian** dinyatakan "Segala macam ukiran adalah naga-nagaan, barong-barongan, ukiran (tumbuh-tumbuhan), ukiran kera, ukiran singa, segala macam ukiran tanyalah **Maranggi** (ahli ukir)" (Siksa. XVII: 13--5)

yang masing-masing bernama **Bima**, **Punta**, **Narayana**, **Madura**, **Suradipati** (CP. XVI: 9)

Ayatrohaedi (1978) pernah menafsirkan bahwa nama Pakwan Pajajaran sebagai ibu kota Kerajaan Sunda, sangat mungkin didasarkan pada adanya 5 bangunan keraton yang didirikan sejajar. Menurut Ayatrohaedi:

"Barangkali keraton induk terletak di tengah jajaran itu, walau pun memang terbuka kemungkinan bahwa bangunan induk itu terletak paling ujung (depan atau pun belakang), jika kita mengingat bahwa namanya selalu disebutkan sebagai unsur terakhir dari kompleks bangunan keraton itu..." (1978: 52).

Kemudian dipertanyakan juga arah hadap bangunan-bangunan keraton yang berjajar itu. Menurut Ayatrohaedi berdasarkan uraian cerita-cerita Pantun Sunda, besar kemungkinan jika jajaran itu membujur dari utara ke selatan, bukan melintang dari barat ke timur (1978:52). Penafsiran berdasarkan kisah-kisah pantun tersebut nampaknya didukung pula dengan peninggalan data arkeologi, interpretasi atas laporan perjalanan orang-orang Belanda dan juga berdasarkan perbandingan struktur bagian-bagian keraton dari masa perkembangan Islam di Nusantara.

Peninggalan arkeologi yang sebagian masih dapat ditemukan hingga kini adalah bagian-bagian dinding benteng batu yang mengelilingi seluruh kompleks keraton dahulu. Selain itu bagian-bagian parit yang mengelilingi tembok kota Pakwan dahulu, sekarang juga masih dapat ditelusuri walaupun sebagian besar telah hilang. Hal yang penting adalah prasasti Batu Tulis dan arca Purwa Galih yang dahulu pernah disaksikan oleh Scipio, Winkler, dan Riebeeck sekarang masih ada bahkan telah dibuatkan cungkup oleh penduduk setempat. Sementara itu dalam laporan Riebeeck yang melakukan perjalanan dalam tahun 1709, ia menyebut adanya tanah lapang (alun-alun). Dalam laporan perjalanan yang dilakukan pada tahun 1704 secara tersamar sebenarnya Riebeeck pernah juga menyebut adanya tanah lapang bagian bawah yang sangat mungkin adalah alun-alun seperti yang dikunjungi tahun 1709 (Danasasmita 1979: 12--3)

Saleh Danasasmita (1979) berhasil merekonstruksi "kota Pakwan" berdasarkan laporan perjalanan orang-orang Belanda dahulu yang dipadukan dengan tinggalan arkeologis yang masih ada sekarang. Dalam gambar rekonstruksi tersebut terlihat bahwa alun-alun terletak di sisi paling utara dari kompleks kraton Pakwan. Jika dibandingkan dengan keadaan keraton-keraton yang masih ada hingga sekarang baik di Cirebon, Yogyakarta, dan Surakarta, letak alun-alun tersebut berada di sisi utara keraton; sebelah selatannya adalah kompleks keratonnya. Keraton-keraton di Cirebon, yaitu Kasepuhan, Kanoman,dan Kacirebonan menghadap ke alun-alun, berarti menghadap ke utara, maka kemungkinan besar kompleks keraton Pakwan pun menghadap ke utara, berarti 5 bangunan keraton tersebut semuanya menghadap ke utara

Tafsiran Ayatrohaedi berdasarkan cerita pantun bahwa 5 bangunan keraton Pakwan Pajajaran tersebut berjajar dari utara ke selatan ternyata sesuai dengan interpertasi dan analogi dengan tinggalan arkeologi keraton-keraton Cirebon yang dahulu memang termasuk wilayah Kerajaan Sunda[5]. Bangunan-bangunan keraton Pakwan sangat mungkin berderet sebagai berikut; bangunan paling utara adalah **Bima**, kemudian di belakangnya menyusul **Punta**, **Narayana**, **Madura** dan **Suradipati** merupakan bangunan keraton paling belakang (selatan) sebagai tempat persemayaman raja; jadi keraton induknya (Suradipati) tidak terletak di tengah, sebagaimana yang diduga oleh Ayatrohaedi (1978: 52).

Berdasarkan nama-nama bangunan keraton tersebut mungkin dapat ditelusuri fungsinya masing-masing. **Bima**, merupakan bangunan keraton paling utara, sangat mungkin sebagai markas para pengawal istana Pakwan. Nama Bima mengacu pada nama tokoh ke-2 Pandawa Bhima, seorang ksatriya berbadan tinggi besar, lugas, pembela kebenaran dan pengawal setia saudara-saudara Pandawa lainnya. Letak bangunan itu paling utara, paling dekat dengan alun-alun dan memang sesuai dengan untuk mengawal gerbang utama kompleks keraton Pakwan di sisi utara. Mungkin bangunan **Bima** dapat dibandingkan fungsinya dengan bangunan-bangunan di **sitinggil** keraton Kasepuhan, Cirebon yang juga dipergunakan sebagai tempat para pengawal/prajurit penjaga keraton. Juga berfungsi sebagai tempat penyambutan para tamu

---

Tidak terlalu menyimpang kiranya jika meninjau pembagian ruang dalam keraton Kasepuhan sebagai upaya untuk mengetahui fungsi keraton Pakwan Pajajaran **Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati**; sebab menurut berbagai sumber tradisi bahwa para penguasa Cirebon sebenarnya keturunan dari keluarga raja-raja Sunda, dengan rajanya yang terkenal Prabu Siliwangi, hal itu disebutkan dalam naskah **Purwaka Caruban Nagari**, **Babad Cirebon**, dan **Sejarah Cirebon**. Pendiri Kesultanan Cirebon yaitu Syarif Hidayattulah yang kelak lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, menurut sumber tradisi adalah cucu Prabu Siliwangi, ia adalah putra dari Dewi Rara Santang yang kawin dengan Syarif Abdullah anak Raja dari Mesir (Abdurachman 1982: 37).

Oleh karena itu agaknya arsitektur keraton Pakwan tercermin dalam keratonkeraton Cirebon, bahkan dalam **Purwaka Caruban Nagari** keraton Pakwan tersebut dikenal dengan sebutan Sang Bima (Sulendraningrat 1972: 10).

agung yang memang datang lewat jalan utama di utara keraton.

Punta, nama tersebut tidak sepenuhnya diambil dari nama wayang (Puntadewa= Yudhistira) Tetapi bentukan dari kata Jawa/Sunda kuna **pun + kita** ----> **punta** yang berarti hamba atau sahaya. Jadi fungsi bangunan keraton yang bernama **Punta** sangat mungkin diperuntukkan bagi tempat para abdi, hamba, atau rakyat biasa jika mereka berkunjung menghadap raja.Rakyat atau para pejabat lainnya yang mungkin datang dari daerah-daerah akan diterima di **Pun-ta**, mereka tentunya duduk bersila menunggu giliran menghadap raja. **Punta** mungkin dapat disamakan fungsinya dengan **Jinem Pangrawit**, yaitu serambi depan keraton Kasepuhan. Secara tradisional dapat diketahui bahwa tamu-tamu yang akan menghadap sultan diterima dulu oleh pihak kerabat keraton di ruangan **Jinem Pang-rawit**, tamu lalu mengutarakan dulu maksud dan tujuannya, sebelum menghadap Sultan Kasepuhan.

Narayana, adalah nama bagi bangunan keraton yang lainnya lagi. **Narayana** adalah nama Kresna ketika masih muda remaja. Menurut kisah wayang Purwa, sesuai dengan jiwa mudanya, Narayana suka pada kegiatan kesenian, karena itu dapat diduga bahwa bangunan kraton yang bemama **Narayana**, sangat mungkin dipergunakan untuk pertunjukan kesenian dan semacamnya yang sangat mungkin berkaitan dengan ritus atau kesenian penghormatan bagi leluhur Bagian keraton yang berfungsi seperti itu dapat dijumpai pula di keraton Kasepuhan, ruangan dalam keraton Kasepuhan yang dipergunakan bagi pagelaran kesenian dan juga dipergunakan untuk upacara **pajang jimat** dinamakan dengan **Blandongan Jinem**. Jadi ruangan tersebut terkesan sudah agak sakral, karena memang letaknya lebih dalam, juga fungsinya untuk kegiatan kesenian yang berhubungan dengan religi.

Madura, nama kraton tersebut mungkin berasal dari kata Sansekerta **madhura**; yang telah diserap ke dalam bahasa Jawa Kuna, artinya adalah "tutur kata yang lemah-lembut" (Mardiwarsito 1986: 331). Agaknya memang sengaja bangunan keraton yang paling dekat dengan tempat tinggal raja (**Suradipati**) dinamakan demikian, karena sangat mungkin di ruangan keraton **Madura** Raja Sunda muncul di hadapan para pejabat kerajaan. Ia bertutur kata lemah lembut, tentu saja para pejabat juga harus bertutur kata lemah lembut penuh tata krama dengan rajanya. Jadi **Madura** adalah keraton tempat penuh dengan peradatan dalam bertatap muka dengan raja, di tempat itu pula segala perbincangan tentang kerajaan terjadi

Tata cara dalam berkunjung ke keraton Pakwan itu dijelaskan dalam kitab Sang **Hyang Siksa Kanda Ng Karesian** sebagai berikut.
"Bila kita masuk ke keraton, maka baik-baiklah melihat, jangan sampai melanggar, mendorong, mengganggu atau memutus jajaran (orang-orang duduk). Bila kita duduk jangan salah menghadap baik-baiklah bersila. Dan sekiranya kita diajak bicara oleh raja, pikirkanlah betul-betul bicara kita. Harus layak supaya menyenangkan raja..." (Siksa. X: 10–5). Dalam bagian lain kitab tersebut menyatakan: "Jika di antara kita (ada) yang dimarahi oleh raja, itu semua jangan ditiru perbuatannya, nanti kitapun mendapat marah pula. Ini perbandingannya, kalau orang pergi ke hutan menginjak duri, lalu kitapun menginjaknya, terasa sama sakitnya. Bila ada di antara kita yang terpuji: cekatan, terampil, penuh keutamaan, cermat, teliti, rajin, tekun, setia kepada tugas dari raja. Yang demikian itu perlu ditiru perbuatan dan kemahirannya, pasti kita pun akan mendapat pujian pula" (Siksa. X. 24--6; XI: 1--5)

Sementara itu di keraton Kasepuhan terdapat juga ruangan keraton yang disebut **Pringgondani**, di ruang itu Sultan bertemu dengan para pejabat atau tamu-tamu lainnya. Tentu saja perbincangan yang terjadi penuh dengan tata krama dan peradatan yang sangat takzim. Dengan demikian dugaan bahwa keraton **Madura** di Pakwan Pajajaran sebagai tempat raja, para pejabat serta rakyat biasa saling berhadapan untuk bercakap-cakap tidaklah jauh menyim-pang. Karena keadaan seperti itu ditegaskan pula dalam kitab **Siksa Kanda Ng Karesian**.

Di keraton Kasepuhan pada sisi timur ruang **Pringgondani** terdapat bangunan tempat tinggal Sultan Kasepuhan yang dinamakan **Dalem Arum**. Antara ruang **Pringgondani** dan **Dalem Arum** dihubungkan dengan pintu, jadi ruang-ruang itu saling berdekatan, hanya disekat dinding tembok. Kiranya hal seperti itu terjadi juga di istana Pakwan, keraton **Madura** dan **Suradipati** sebagai tempat tinggal raja sangat mungkin satu bangunan induk besar, tapi atapnya terpisah. **Suradipati** berasal dari kata kata **sura + adipati** (=tempat tinggal raja)[7] hal ini dapat dibandingkan dengan nama keraton Kerajaan Sunda saat berpusat di daerah Kawali, keraton itu adalah **Surawisesa**[8]. Nama

[7] Bandingkan dengan **Suralaya** yang berarti tempat tinggal para dewa (Mardiwarsito 1986: 549), tempat itu dikenal pula dengan sebutan **kadewatan**, atau **swargaloka**.

[8] Kutipan prasasti Kawali yang menyebut adanya kraton Surawisesa adalah sebagi berikut:

Surawisesa terdiri dari 2 kata yaitu **sura + wisesa**, artinya tempat kekuasaan tertinggi (Mardiwarsito 1986: 690); atau dengan perkataan lain sebagai tempat persemayaman raja, karena hanya raja yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu kerajaan.

Demikianlah dapat diketahui bahwa keraton **Suradipati** terletak paling belakang dari deretan keraton di Pakwan Pajajaran. Tempat paling belakang berarti paling selatan, hal ini sejalan dengan konsep keagamaan saat itu (Hindu-Buddha) bahwa keraton utama sebagai tempat tinggal raja terletak paling dekat dengan rangkaian pegunungan di selatan Pakwan, yaitu Gunung Salak, Pangrango, dan Gede (Ageung). Sebab dalam kepercayaan Hindu-Buddha gunung dianggap sebagai tempat persemayaman para dewa, dan juga di gunung-gunung itu bersemayam leluhur **(hyang)** yang telah diperdewa, merekalah yang terus-menerus "menjaga" keutuhan kerajaan Sunda seperti yang tersirat dari kitab-kitab keagamaan Sunda Kuna[9]

Hal yang menarik adalah penataan rumah-rumah di perkampungan orang Baduy di Banten Selatan. Penataan rumah tersebut mungkin meyiratkan suatu kesan dari masa lalu dalam periode Kerajaan Sunda. Seperti telah dikemukakan oleh beberapa ahli bahwa orang Baduy sebenarnya telah hidup mengasingkan diri sejak jaman perkem bangan Kerajaan Sunda, mungkin hal ini berkaitan dengan cara ke hidupan mereka yang menghendaki demikian[10] Oleh karena itu keletakan rumah-rumah perkampungan Baduy (dalam) sangat mungkin masih mengikuti aturan tradisi yang turun temurun. Kenyataan yang menarik adalah bahwa rumah **Puun** sebagai kepala kampung yang dituakan karena pengetahuan religi dan tradisinya terletak paling selatan dari rumah-rumah perkampungan Baduy (dalam). Di depan rumah Puun itu terentang tanah kosong, semacam halaman luas yang memisahkan deretan rumah-rumah di sisi barat dan timurnya. Di sisi utara tanah kosong tersebut terdapat bangunan **bale**, tempat dilalukannya pertemuan-pertemuan adat, untuk menerima tamu dari luar Baduy, dan sebagai tempat persiapan upacara yang berkaitan dengan **kegiatan** pertanian mereka. Di sisi utara kampung terdapat pula lumbung padi **(leuit)** dan tempat menumbuk padi **(saung lisung)** yang dipergunakan secara bersama-sama oleh seluruh warga kampung (Gama 1993: Gambar 6--2).

4.

Kajian ini sengaja membicarakan periode akhir perkembangan kerajaan Sunda, karena memang data yang tersedia hingga kini hampir sebagian besar berasal dari masa tersebut. Berita lebih tua tentang Kerajaan Sunda kebanyakan berasal dari sumber sejarah abad 15 atau 16 M pula dan itu pun bersifat terbatas sehingga tidak dapat melakukan perbandingan isi sumber berita untuk mencari kesimpulan yang paling layak, atau mendekati kebenaran sejarah. Atas dasar pertimbangan itu maka pembicaraan perihal penataan wilayah Kerajaan Sunda tidak meluas hingga masa sebelum abad 15 M (misalnya saat ibu kota di Kawali), sebab dikhawatirkan yang muncul hanya dugaan-dugaan semata.

Berdasarkan data yang terbatas akhirnya dapat pula disimpulkan penataan wilayah Kerajaan Sunda dalam periode abad 15--6 M. Tentu saja kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara yang dapat di perbaiki atau dilengkapi dalam penelitian-penelitian lain di masa mendatang. Gambaran penataan wilayah tersebut dapat terlihat dalam bagan berikut.

"..*nihan tapa kawali nusiya mulia tapa bhaga parebu raja wastu mangadeg di kuta kawali nu mahayu na kadatuan surawisesa...*"

("... Yang bertapa di Kawali ini ialah yang mulia pertapa yang berbahagia Prabu Raja Wastu yang bertahta di kota Kawali, yang memperindah keraton **Surawisesa**...") (Danasasmita 1983/84, III: 36).

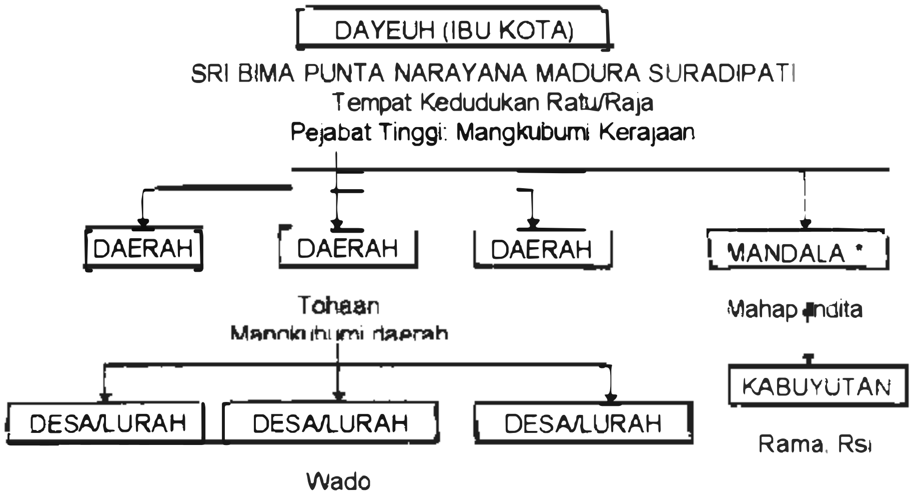
[9] Mengenai kepercayaan bahwa para leluhur (**hyang**) yang menjaga keutuhan kerajaan Sunda tinggal di puncak gunung misalnya disebutkan dalam naskah **Sewaka Darma**,

"..*tiba ditempat yang terang benderang*
terlihat para leluhur
Gunung Kendan, Medang dan Menir
tempat tinggal para leluhur... (Danasasmita Dkk. 1987: 64).

Gunung Kendan, Medang, Menir, Galunggung, dan gunung-gunung lainnya di Jawa Barat yang dianggap sebagai tempat persemayaman para **hyang** juga disebutkan berkalikali dalam **Carita Parahyangan**, lihat Atja (1968). **Tjarita Parahyangan: Naskah Titilar Karuhun Urang Sunda Abad ka-16 Masehi**. Bandung: Yayasan Kebudayaan Nusalarang.

[10] Lihat catatan 4, juga lihat Saleh Danasasmita dan Anis Djatisunda (1986), **Kehidupan Masyarakat Kanekes**, terutama halaman 2--7 Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi), Depdikbud.

SUSUNAN PENATAAN WILAYAH KERAJAAN SUNDA (PRAHAJYAN SUNDA)



Keterangan * termasuk ke dalam **mandala**
adalah juga **kawikuan**, dan **karesian**

Dalam berbagai sumber sejarah tidak ada yang menyebutkan secara rinci berapa jumlah "negara daerah" yang bernaung di bawah kekuasaan raja Sunda. Juga tidak ada contoh yang menyebutkan suatu "negara daerah", misalnya X terdiri dari desa-desa yang berada di bawah kekuasaan negara daerah X tersebut. Sedangkan mengenai wilayah keagamaan, paling tidak disebut-sebut jenisnya dalam beberapa sumber sehingga memungkinkan untuk melakukan penafsiran

Hal yang masih belum jelas ada para pejabat di lingkungan keraja an Sunda. Naskah **Siksa Kanda Ng Karesian** memang menjelaskan tata jenjang pengabdian, tapi hal itu bukan sepenuhnya urutan jabatan dalam pemerintahan kerajaan melainkan tercampur dengan **bakti** dalam konsep keagamaan. Mungkin yang dapat dijadikan data pejabat-pejabat kerajaan mulai dari **wado** terus ke atas hingga **ratu** (raja), sebagai pejabat yang berhubungan langsung dengan birokrasi kerajaan.

Wado sangat mungkin adalah kepala desa, sebab dinyatakan dalam **Siksa Kanda Ng Karesian** bahwa petani harus patuh pada wado. Jadi wado adalah jabatan yang langsung berhubungan dengan rakyat Kerajaan Sunda yang hidup dari kegiatan agraris. Di atas **wado** adalah **mantri**, mungkin setingkat camat sekarang, di kecamatan saat ini masih dikenal pejabat **mantri polisi**, sangat mungkin jabatan itu memang telah ada dalam masa Kerajaan Sunda dalam bentuk pengawas para kepala desa. Kemudian di atas **mantri** adalah **nu nangganan**, pejabat ini belum diketahui secara pasti kedudukannya, namun pada bagian lain **Siksa Kanda Ng Karesian** menyebutkan bahwa **nu nangganan** ialah pemimpin bala tentara dan disebut juga dengan **tanda** (Siksa.VI: 14--6). Jadi **nu nangganan** dapat ditafsirkan sebagai jabatan tertinggi militer yang bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan kerajaan. Akhirnya jabatan tertinggi sebelum raja adalah **mangkubumi**, jabatan ini dikenal juga dalam masa Majapahit di Jawa Timur. Berdasarkan berbagai sumber sejarah dapat diketahui bahwa **(patih) mangkubumi** adalah orang kedua setelah raja ia bertindak sebagai wakil raja atau perdana mentri (koordinator para pejabat tinggi kerajaan)

Susunan pejabat seperti itulah yang agaknya dikenal baik di pusat (Kerajaan Sunda secara umum) atau di tingkat kerajaan daerah. Pejabat- pejabat di daerah akan bertanggung jawab pada raja daerah **(Tohaan)**, dan masing-masing daerah mempunyai seperangkat pejabat seperti yang diuraikan dalam **Siksa Kanda Ng Karesian**

Mengenai pergantian raja di Kerajaan Sunda, setelah raja yang memerintah sebelumnya meninggal atau mengundurkan diri, menurut sumber-sumber sejarah yang ada raja penggantinya ialah putra raja terdahulu; dalam hal jika raja terdahulu tidak mempunyai anak lelaki yang pantas dan layak menjadi raja, maka raja yang baru ditunjuk dari salah seorang penguasa daerah. Mungkin penguasa-penguasa daerah berembuk untuk mengisi kekosongan tahta Sunda, kemudian diputuskan bahwa salah seorang dari mereka dengan kriteria khusus layak untuk dirajakan di Pakwan Pajajaran (Sumadio 1984 380)[11]

[11] Agar lebih jelas mengenai kriteria dan proses pemilihan raja baru pada masa Kerajaan Sunda lihat **Sejarah Nasional Indonesia II: Jaman Kuna**.

Penelitian terhadap perkembangan Kerajaan Sunda tetap masih perlu dilakukan di masa mendatang, karena baru sedikit aspek saja yang telah menjadi perhatian dan dibicarakan oleh para ahli. Kendala utama terhadap penelitian tersebut tentu saja hal kelangkaan data. Namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan sehingga sejarah Kerajaan Sunda menjadi terbaikan, karena sebenarnya masih cukup banyak sumber tertulis berupa karya sastra yang belum dikaji, sehingga kesempatan untuk mengusut lebih lanjut perihal eksistensi Kerajaan Sunda masih terbuka lebar.

Tinggalan arkeologi yang berasal dari kerajaan tersebut juga sangat sedikit, jika dibandingkan dengan aneka macam benda arkeologi yang berasal dari kerajaan-kerajaan kuna di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun hal itu perlu menjadi renungan sebab siapa tahu tinggalan arkeologis dari Kerajaan Sunda secara umum memang berbeda wujudnya dengan candi, arca, relief, pemandian kuna dan lain-lain yang berasal dari Kerajaan Mataram, Kadiri, Singhasari, dan Majapahit. Oleh karena itu para peminat kebudayaan Sunda Kuna harus lebih jeli jika mengamati berbagai situs di wilayah Jawa Barat, sangat mungkin apa yang semula dianggap sebagai situs dari masa prasejarah, khususnya tradisi megalitik, justru setelah dikaji secara mendalam sebenarnya berasal dari periode sejarah, masa perkembangan Kerajaan Sunda.

"Ucapan terima kasih ditujukan kepada Prof. Dr. Ayatrohaedi (Mang Ayat) yang kerap melakukan diskusi singkat dengan penulis. diskusi-diskusi itu merupakan dorongan yang amat berharga sehingga tersusunlah makalah ini"

Depok, 13 Februari 1994.

KEPUSTAKAAN

Abdurachman, Paramita R (Penyunting). 1982. **Cerbon.** Jakarta: Sinar Harapan

Atja.1968 **Tjarita Parahijangan: Naskah Titilar Karuhun Urang Sunda Abad ka-16 Masehi.** Bandung. Jajasan Kebudajaan Nusa Larang

Ayatrohaedi, 1978 *Pajajaran atau Sunda*, dalam **Majalah Arkeologi** Th.1, No.4 Maret 46--54. Jakarta. Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia

Ayatrohaedi, 1980/81 *Masyarakat Sunda Sebelum Islam*, **Majalah Ilmu-ilmu Sastra.** Jilid IX, No.4: 33-42 Jakarta. Fakultas Sastra Universitas Indonesia

Ayatrohaedi, Tien Wartini & Undang Ahmad Darsa, 1987 **Kawih Paningkes dan Jatiniskala: Alih Aksara dan Terjemahan.** Bandung: agian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi), Depdikbud.

Boechari, 1980, The *Inscription of Mula Malurung: A new evidence on the historicity of Ken Angrok*, **Majalah Arkeologi** Th.III, No.1-2, Sept.-Nov. hlm 55-70

Boechari, 1985/86, **Prasasti Koleksi Museum Nasional Jilid I** Jakarta:Proyek Pengembangan Museum Nasional.

Cortesao,Armando,1944 **The Suma Oriental of Tome Pires** London The Hakluyt Society

Dam,H Ten.,1957, *Verkenningen Rondom Padjadjaran*, **Indonesie**, X/4 290-310.

Danasasmita, Saleh, 1979,**Lokasi "Gerbang Pakuan" dan Rekonstruksi Batas-batas Kota Pakuan berdasarkan Laporan Perjalanan Abraham van Riebeeck dan Ekspedisi VOC lainnya (1687–1709)**. Bandung:Lembaga Kebudayaan Universitas Pajajaran

Danasasmita, Saleh 1983, **Sejarah Bogor** Bogor Pemda Kotamadya DT.II Bogor

Danasasmita, Saleh. Yoseph Iskandar & Enoch Atmadibrata, 1983/84 **Rintisan Penelusuran Masa Silam: Sejarah Jawa Barat, Jilid 3.** Bandung: Proyek Penerbitan Buku Sejarah Jawa Barat Pemda Tingkat I Jawa Barat

Danasasmita, Saleh & Anis Djatisunda 1986 **Kehidupan Masyarakat Kanekes** Bandung Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian kebudayaan Sunda (Sundanologi), Depdikbud

Danasasmita, Saleh, Ayatrohaedi, Tien Wartini & Undang A.Darsa, 1987 **Sewa ka Darma. Sanghyang Siksakanda Ng Karesian,**

Bambang Sumadio (Penyunting). Bab VII "Kerajaan Sunda". halaman 376–83 Jakarta: Balai Pustaka Tahun 1984

Amanat Galunggung. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Depdikbud.

Garna,Yudhistira,1993. *Masyarakat Baduy di Banten* **Masyarakat Terasing di Indonesia,** Koentjaraningrat, V. Simorangkir (penyunting), hlm. 120-52 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mardiwarsito, L., 1986, **Kamus Jawa Kuna-Indonesia.** Ende: Nusa Indah.

Munandar, Agus Aris, 1991 **Kegiatan Keagamaan Dalam Masyarakat Kerajaan Sunda: Data Prasasti dan Karya Sastra.** dalam Seminar Nasional Sastra dan Sejarah Pakuaan Pajajaran, diselenggarakan oleh Universitas Paku-an, Bogor 11--3 November 1991.

Munandar, Agus Aris 1992 *Bangunan Suci Pada Masa Kerajaan Sunda: Data Arkeologi dan Sumber Tertulis*, **Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI.** Batu, Malang, Jawa Timur 26--30 Juli 1992. Hlm 267–92.

Noorduyn, J.,1992,*Bujangga Manik's Jorneys Thro-ugh Java:Topographical Data From An Old Sundanese Source*, **BKI**. Deel 138,4e Aflerering s'-Gravenhage: Martinus Nijhoff

Sulendraningrat, P.S., 1972 **Purwaka Tjaruban Nagari.** Jakarta. Bhratara.

Sumadio,Bambang (Penyunting), 1984 **Sejarah Nasional Indonesia II: Jaman Kuna.** Jakarta: Balai Pustaka

Sutaarga,Amir,1965, **Prabu Siliwangi atau Ratu Purana Prebu Guru Dewataprana Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakwan Pajajaran (1474–1517).** Djakarta: Duta Rakjat

Von Heine Geldern, Robert, 1982 **Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara.** Penterjemah Deliar Noer. Jakarta: Rajawali.